

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor ekonomi yang penting kedudukannya di Indonesia sebagai sumber pendapatan masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas harga berlaku menurut sektor usaha pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi sektor kedua yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi setelah sektor industri pengolahan. Sektor pertanian menyumbang 13,26 persen dari total PDB pada tahun 2017, sedangkan sektor industri pengolahan menyumbang 20,27 persen. Melihat pentingnya sektor pertanian, maka diperlukan upaya nyata untuk mengembangkan dan memajukan sektor pertanian secara berkelanjutan (BPS, 2017).

Sektor pertanian secara luas terdiri dari beberapa subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Subsektor tanaman pangan sebagai bagian dari sektor pertanian memiliki peranan mewujudkan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan devisa. Sampai saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia masih menjadikan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras diperlukan adanya alternatif pangan pengganti beras yang menjadi sumber karbohidrat misalnya ubi kayu dalam mewujudkan program diversifikasi pangan. Menurut Undang-Undang pangan No 18 tahun 2012 diversifikasi pangan merupakan upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Ubi kayu merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki banyak manfaat sebagai bahan baku pengolahan pangan tradisional, seperti tape, nagasari ketela, keripik, onggol-onggol ketela, dan cetot. Seiring berjalannya waktu, ubi kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan tradisional untuk dikonsumsi melainkan bisa digunakan untuk kebutuhan agroindustri besar seperti pabrik tepung tapioka.

Ubi kayu juga memiliki karakteristik yang membuat menarik petani dalam membudidayakannya. Hal ini dikarenakan ubi kayu kaya akan karbohidrat, tersedia sepanjang tahun dan lebih toleran terhadap tanah yang memiliki kesuburan yang rendah serta tahan terhadap kekeringan, hama, dan penyakit (Aboki *et al*, 2013). Akan tetapi, dalam melakukan usahatani ubi kayu memerlukan modal untuk budidaya dan pengolahannya.

Modal merupakan penggerak pokok bagi pengembangan usaha. Menurut Ashari (2009), modal dapat: (1) membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif kecil, dan (2) mengurangi ketergantungan petani pada pedagang perantara dan pelepas uang. Ketersediaan modal bagi pelaku usaha pertanian merupakan keharusan. Fungsi modal tidak hanya sebagai salah satu faktor produksi, tetapi juga berperan dalam peningkatan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi seperti benih bermutu, pupuk, alat-alat pertanian, dan teknologi pasca panen.

Kondisi riil pada masyarakat perdesaan umumnya adalah bahwa sumber daya permodalan untuk usahatani masih kecil dan menggunakan modal sendiri. Menurut Syukur (2009), hampir 90 persen petani mandiri menggunakan modal sendiri untuk membiayai usaha pertaniannya. Tiap musim tanam, petani mengusahakan modal dari berbagai cara agar dapat menanam, termasuk menggunakan aset pribadi, seperti kendaraan yang dipakai untuk kerja, rumah yang disewakan, tanah yang dikontarkan, dan asuransi. Sementara pendapatan dan aset petani juga digunakan untuk berbagai keperluan keluarganya untuk konsumsi pangan, pakaian, sekolah anak, kesehatan, dan biaya sosial.

Kondisi tersebut disebabkan usaha pertanian yang sebagian besar berupa petani gurem dan kecil dihadapkan kepada keterbatasan akses layanan usaha, terutama permodalan. Ketidakmampuan masyarakat perdesaan dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal disebabkan oleh: (1) keberadaan lembaga keuangan formal di perdesaan masih sangat terbatas, (2) prosedur dan persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan formal dinilai sulit dan berat, dan (3) petani tidak mampu mengakses kredit dengan aturan dan suku bunga

seperti yang ditetapkan pada usaha komersial diluar agribisnis (Departemen Pertanian, 2005).

Secara umum, usaha di sektor pertanian masih dianggap beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum berkembangnya lembaga penjamin serta belum adanya lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007). Dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka telah mencanangkan sebuah program yang tujuannya untuk membantu petani dalam mendapatkan modal untuk berusahatani khususnya untuk usahatani ubi kayu. Program tersebut dinamakan Kebun Singkong Rakyat (KSR).

Program KSR merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk mengatasi keterpurukan ekonomi khususnya di Kabupaten Bangka dengan memanfaatkan lahan untuk pengembangan tanaman ubi kayu. KSR berbentuk bantuan modal usaha kepada masyarakat yang tergabung dalam gapoktan ataupun kelompok tani. Program KSR memiliki tujuan antara lain: (1) mengatasi keterpurukan ekonomi petani, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyedia mitra tani, (3) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Program Kebun Singkong Rakyat (KSR) dicanangkan pada tahun 2016. Melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai pelaksana langsung program KSR. Pemerintah Kabupaten Bangka berharap dana bantuan ini bisa tersalurkan dengan tepat sasaran. Penyaluran dana ini difokuskan pada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usahatani ubi kayu.

Berdasarkan kebijakan teknis program KSR, sebaran lokasi KSR dilaksanakan di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Bakam, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Merawang, Kecamatan Pemali, Kecamatan Puding Besar, Kecamatan Riau Silip,

dan Kecamatan Sungailiat. Dari 8 sebaran Kecamatan tersebut yang memiliki partisipasi cukup baik untuk bergabung dengan program KSR ini yaitu di Kecamatan Puding Besar. Kecamatan Puding Besar terdiri dari 7 kelurahan/desa yaitu Desa Kayu Besi, Desa Kotawaringin, Desa Labu, Desa Puding Besar, Desa Nibung, Desa Saing dan Desa Tanah Bawah. Dari 7 kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Puding Besar, hanya ada 4 Desa yang mengikuti program Kebun Singkong Rakyat (KSR). Kecamatan Puding Besar juga merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar ketiga setelah Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Mendo Barat. Dibuktikan melihat luas tanam, panen, produksi dan produktivitas ubi kayu di Kabupaten Bangka pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu di Kabupaten Bangka

No.	Kabupaten Bangka	Luas Tanam (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha/Th)
1	Mendo Barat	340,00	282,50	4.237,50	15,00
2	Merawang	29,00	28,00	420,00	15,00
3	Belinyu	15,00	27,00	405,00	15,00
4	Sungailiat	50,00	33,00	495,00	15,00
5	Pemali	5,00	21,00	315,00	15,00
6	Bakam	7,00	14,00	210,00	15,00
7	Riau Silip	338,00	477,00	7.155,00	15,00
8	Puding Besar	52,00	55,00	825,00	15,00

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Bangka, 2017

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa Kecamatan Riau Silip merupakan kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi ubi kayu sebesar 7.155,00 Ton. Sedangkan untuk Kecamatan Puding Besar memberikan kontribusi terbesar ketiga sebesar 825,00 Ton setelah Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Mendo Barat.

Pelaksanaan program KSR ini merupakan program perdana yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya masih jauh dari sempurna, karena diperlukan sosialisasi dan penjelasan yang utuh mengenai program ini kepada petani desa yang minim pendidikan sehingga masih banyak perbaikan, saran maupun masukan yang

berguna bagi pelaksanaan program ini pada periode selanjutnya. Hal inilah yang mendorong untuk lebih dikaji bagaimana pelaksanaan program ini.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan program KSR yang telah Pemerintah Kabupaten Bangka canangkan maka dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam menunjang kesuksesan pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat memegang bagian terpenting demi kemajuan masyarakat dalam mewujudkan suatu tujuan bersama. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan selalu diarahkan kepada kondisi yang lebih baik, sehingga keadaan yang lebih baik tersebut akan dirasakan oleh individu, keluarganya, kelompoknya, masyarakatnya dan bangsanya. Partisipasi diartikan tidak hanya menyumbang tenaga, tetapi partisipasi harus diartikan lebih luas, yaitu harus menyangkut taraf perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Secara ekonomis, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkatkan aktivitas petani tersebut dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Pelaksanaan program KSR membutuhkan partisipasi petani dalam berbagai kegiatan yang diadakan, karena pada dasarnya petanilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program. Partisipasi diprediksi akan terus berlanjut selama petani merasa puas atau diuntungkan dengan ikut serta dalam kegiatan tersebut (Irawan, 2011). Pemerintah Kabupaten Bangka berharap program KSR ini bisa dilakukan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka serta memberikan dampak yang baik untuk pendapatan petani yang mengikutinya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Kebun Singkong Rakyat (KSR) di Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Kebun Singkong Rakyat (KSR) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka?

2. Bagaimana tingkat partisipasi petani terhadap program Kebun Singkong Rakyat (KSR) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka?
3. Berapa pendapatan petani ubi kayu sebagai peserta program Kebun Singkong Rakyat (KSR) di Kecamatan Puding Besar?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program Kebun Singkong Rakyat (KSR) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Menganalisis tingkat partisipasi petani dengan adanya program Kebun Singkong Rakyat (KSR) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Menganalisis pendapatan petani ubi kayu sebagai peserta dalam program Kebun Singkong Rakyat (KSR).

1.4 Kegunaan

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai program-program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
2. Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat berguna sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi pemerintah, sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada Dinas Pertanian agar bisa maksimal dalam melakukan sosialisasi mengenai programnya kepada masyarakat.
4. Bagi masyarakat Kecamatan Puding Besar khususnya petani yang menjadi peserta program Kebun Singkong Rakyat (KSR) sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan usahataniya agar mendapatkan pendapatan yang maksimal.